

ABSTRAK

Sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meliputi membuat produk hukum daerahnya sendiri seperti peraturan daerah dan menegakan peraturan daerah. Kabupaten Kediri memiliki Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum yang didalamnya mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol tanpa izin penjualan yang sah dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri diberikan tugas untuk menegakan peraturan daerah tersebut yakni dalam bentuk operasi yustisi untuk menangani pelanggaran peraturan daerah terkait penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak pelanggaran sehingga belum terlihat progresif dalam pelaksanaannya. Atas dasar permasalahan tersebut diperlukan penelitian dan analisis terkait efektivitas kinerjanya serta faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan pelanggaran.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan ialah yuridis-sosiologis yakni obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada dan pendekatan faktual yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan untuk memahami fakta di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin penjualan yang sah dari pihak berwenang dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum efektif. Adapun penyebab belum efektifnya ialah terdapat beberapa faktor penghambat meliputi budaya konsumsi minuman beralkohol yang mengakar di masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan jumlah sumber daya yang kurang memadai. Selanjutnya terdapat pula faktor pendorong yang mempengaruhi meliputi komitmen Satpol PP, dukungan masyarakat, dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Kata Kunci : Efektivitas Kinerja - Satuan Polisi Pamong Praja - Minuman Beralkohol

ABSTRACT

In line with regional autonomy, which gives authority to regions to regulate and manage their own households, including making their own local legal products such as local regulations and enforcing local regulations. Kediri District has a Regional Regulation No. 6 of 2017 concerning Public Order Organizers which regulates the prohibition of the sale of alcoholic beverages without a valid sales permit from the competent authority. In this case, the Kediri District Pamong Praja Police Unit is given the task of enforcing the local regulation in the form of a judicial operation to deal with violations of local regulations related to the sale of alcoholic beverages. However, in its implementation there are still many violations found so that it has not looked progressive in its implementation. On the basis of these problems, research and analysis is needed regarding the effectiveness of its performance as well as the inhibiting factors and driving factors that influence the implementation of handling violations.

The type of research used is empirical legal research. This research seeks to see the law in a real sense or examine how the law works in society. The approach used is juridical-sociological, namely the object of study regarding community behavior. The community behavior studied is the behavior that arises from interacting with the existing norm system and the factual approach, namely the approach taken based on a reality that actually occurs and can be proven to understand facts in the field.

The results of this study indicate that the effectiveness of the performance of the Kediri District Pamong Praja Police Unit in handling violations of the sale of alcoholic beverages without a valid sales permit from the authorities in its implementation can be said to be ineffective. The cause of the ineffectiveness is that there are several inhibiting factors including the culture of alcohol consumption that is rooted in society, the low level of community compliance, and the inadequate number of resources. Furthermore, there are also driving factors that influence including the commitment of Satpol PP, community support, and adequate infrastructure.

Keywords: Performance Effectiveness - Satuan Polisi Pamong Praja - Alcoholic Beverages